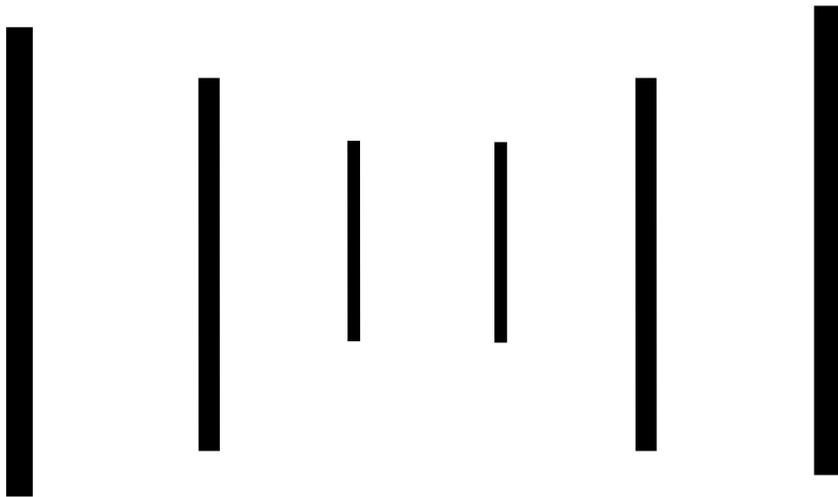




PERUBAHAN RENJA



PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Bangka sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini belumlah sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu dalam membuka wawasan sehingga pada saatnya akan dapat memperbaiki kinerja serta penyusunan Rencana Kerja OPD yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya, dan dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam menjalankan proses pembangunan daerah.

Sungailiat, 23 Agustus 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bangka,



SAPARUDIN, SE
PEMBINA / IV A
NIP. 19680210 200604 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024 merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan satu tahun 2024.

Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran di atas perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung visi, misi tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Penyusunan perubahan rencana kerja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024 serta penyerapan anggaran pada rencana kerja sampai dengan triwulan I menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2024;

Penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024 dimulai dari pengumpulan data dan analisis permasalahan yang menjadi dasar penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka, Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan I, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah

maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan rencana kerja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, maka rancangan perubahan renja perangkat dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah mendapat pengesahan dari Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 .
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe C Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 53);
30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Perhubungan Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 12);
31. Peraturan BUpati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2024 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI RENJAA SAMPAI DENGANN TRIWULAN II TAHUN BERKENANAAN

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Dari 2 (dua) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan yang dianggarkan pada Tahun 2024 maka persentase kegiatan yang telah dilaksanakan belum mencapai target, berdasarkan Laporan Fisik dan Keuangan per Juni 2024, serapan keuangan Dinas Perhubungan baru mencapai 44,33% dari total anggaran sebesar Rp. 10.644.578.339; (sepuluh milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah) dan capaian fisik mencapai 45%,
2. Secara umum faktor penyebab tidak/kurang tercapainya target hasil/keluaran untuk kegiatan yang telah direncanakan dikarenakan ada beberapa kegiatan yang terhalang beberapa peraturan yang menyebabkan per Juni 2024 belum bisa dilaksanakan.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka sampai dengan Juni 2024 sebagai berikut :

TABEL 2. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PER PROGRAM SAMAPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	PROGRAM	REALISASI (%)			
		KINERJA	KATEGORI*)	KEUANGAN	KATEGORI*)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48	SR	47,21	SR
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	42	SR	41,48	SR

	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0,00				0,00			0,00		0,00			100		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah							Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	68,00				68,00			0,00		0,00			0,00		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah							Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3,00				3,00			0,00		0,00			0,00		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah							Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	1,00				1,00			0,00		0,00			0,00		
	Meningkatnya Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	2	15	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100	128.000.000			100	128.000.000	50,00	18.440.000	50,00	34.750.000	53.190.000	53.190.000	0,00	41,55	
								Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai	100				100		50,00		50,00						

									Standar (%)																			
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	15	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	18	78.000.000,00			6	78.000.000	50,00	3	10.080.000	50,00	3	21.350.000	100,00	6	31.430.000	6	31.430.000	33,33	40,29
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	15	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja yang disusun (dokumen)	12	50.000.000,00			4	50.000.000	50,00	2	8.360.000	50,00	2	13.400.000	100,00	4	21.760.000	4	21.760.000	33,33	43,52
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100	3.907.935.823			100	3.907.935.823	25,00		735.377.225	0,00		2.179.202.324	25,00	0	2.914.579.549	25,00	2.914.579.549	25,00	74,58
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2	15	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	3.852.935.823			12	3.852.935.823	25,00	3	727.017.225	25,00	3	2.165.802.324	50,00	6	2.892.819.549	6	2.892.819.549	16,67	75,08

	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	15	01	2	02	003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	20.000.000			2	20.000.000	0,00	0	-	0,00	0	0	0	0	0	0,00			
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	15	01	2	02	007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	126	35.000.000			42	35.000.000	7	3	8.360.000	7,14	3	13.400.000	14,29	6	21.760.000	6	21.760.000	4,76	62,17
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	2	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenan Atribut Lengkap	100	103.750,00			100	19.750.000	25,00		3.840,00	0,00		3.840.000	25,00	0	7.680.000	25,00	7.680.000	25,00	7,40
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian								Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100				100		25,00			0,00			25,00	0		25,00		25,00	
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50,00				12,50		0,00			0,00			0,00	0		0,00		0,00	

	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	15	01	2	05	00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3			1	9.750.000,00	0,00	0	-	0,00	0	-	0	0	0	0	0,00			
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	15	01	2	05	00	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33			11	10.000.000	45,45	5	3.840.000	45,45	5	3.840.000	90,91	0	0	7.680.000	1	7.680.000	30,30	76,80
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	15	01	2	05	00	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15			5	-	0,00	0	-	0,00	0		0	0	0	0	0	0,00		
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	100			100	130.190.000	25,00		34.898.402	0,00		54.808.402	25,00	0	0	89.706.804	25,00	89.706.804	25,00	21,33
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	15	01	2	06	00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36			36	120.190.000	25,00	9	29.568.402	25,00	9	47.018.402	50,80	0	0	76.586.804	1	76.586.804	50,00	21,24

Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	15	01	2	06	00	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	30.000.000			12	10.000.000,00	25,00	3	5.330.000	25,00	3	7.790.000	50,00	6	13.120.000	6	13.120.000	16,67	43,73	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	15	01	2	06	00	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	30.000.000			12	-	25,00	3	-	25,00	3		50,00	6	-	6	-	16,67	0,00	
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	2	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	75,00	2.233.053.500	-	65,00	8.053.500	0,00	-	0,00	-	0,00	0	0	0,00	0	0	-	70,00	-	70,00	0,00
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	15	01	2	07	00	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	800.000.000			0	-	0,00	0	-	0,00	0		0,00	0		0	-	0,00	0,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	15	01	2	07	00	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	900.000.000			0	-	0,00	0	-	0,00	0		0,00	0		0	-	0,00	0,00	

	Tersedianya Mebel	2	15	01	2	07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	25.000.000			0	-	0,00	0	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2	15	01	2	07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	8.053.500			1	-	0,00	0	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	15	01	2	07	0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	500.000.000			0	-	0,00	0	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)	100	932.189.686,00			100	932.189.686	25,00	3	174.473.360	0,00	3	550.481.054	25,00	6	724.954.414	25,00	77,77
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	15	01	2	08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	760.809.338,00			12	760.809.338	25,00	3	147.318.400	25,00	3	474.621.700	5,00	6	621.940.100	6	81,75
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	15	01	2	08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	90.362.865,00			12	90.362.865	25,00	3	11.981.960	25,00	3	28.088.554	5,00	6	40.070.514	6	44,34

	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	15	01	2	08	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	81.017.483,00			12	81.017.483,00	0,00	0	15.173.000	0,00	0	47.770.800	0	0	62.943.800	0	62.943.800	0	0	77,69	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	95,00	213.239.800			75,00	168.239.800	25,00		11.000.000	0,00		43.003.654	25,00	0	54.003.654	25,00	54.003.654	26,32	25,33		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	15	01	2	09	0	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45,00	157.639.800			15	157.639.800	26,67	4	11.000.000	26,67	4	43.003.654	53,33	8	54.003.654	8	54.003.654	17,78	34,26		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	15	01	2	09	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	10.600.000			15	10.600.000	33,33	5		33,33	5	-	66,67	10	-	10	-	22,22	0,00		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	15	01	2	09	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	45.000.000			0	-	0,00	0	0	0,00	0	-	0	0	-	0	-	0	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															24,17				18,47		24		54,13		48		72,61		0	48,42

													1	3													
													7	5													
Predikat Kinerja													SR	SR	SR	R	0	S	SR	SR							
2	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Layanan Transportasi Umum	2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pesentase Wilayah yang Terlayani Angkutan Umum	62,00	16.068.369.530	-	60,00	5.350.219.530	0,00	1.105.949.281	0,00	2.273.493.058	000	00	3.379.442.339	000	3.379.442.339	000	21,03		
	Meningkatnya Manajemen Keselamatan Lalu Lintas								Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan	75,00			70,00			0,00			000	00		000	000				
	Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan	2	15	02	2	02		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Jalan	2000	5.435.219.530		1500	4.935.219.530	0,00	1.049.746.328	0,00	2.109.057.450	000	00	3.158.803.778	000	3.158.803.778	000	58,12		
	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Bangka	2	15	02	2	02	0	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1560	160.000.000		1560	160.000.000	0,00	0	0,00	0	000	00	-	000	-	000	0,00		
	Tersedianya Perlengkapan Jalan	2	15	02	2	02	0	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	200	500.000.000		0	-	0,00	0	0,00	0	000	00	-	000	-	000	0,00		
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	2	15	02	2	02	0	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3242	4.725.219.530		3242	4.725.219.530	100	324	1.049.746.328	100,00	324	204	2.109.057.450	204	3.158.803.778	648	3.158.803.778	200	66,85

	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2	15	02	2	02	0004	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	10.000	50.000.000			1	50.000.000	0,00	0	-	0,00	0	-	0	0	0	0	0	0,00
	Meningkatnya Pengelolaan Terminal Penumpang	2	15	02	2	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C	35,00	5.700.000.000			0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0	0	-	0	0	0,00
	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	2	15	02	2	03	001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1	200.000.000			0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0	0	-	0	0	0,00
	Terbangnya Gedung Terminal	2	15	02	2	03	009	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Gedung Terminal yang terbangun	1	5.000.000.000			0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0	0	-	0	0	0,00
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	2	15	02	2	03	001	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	2	500.000.000			0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0	0	-	0	0	0,00

	Terlaksana nya Penyeleng garan dan Pembangun an Fasilitas Parkir	2	15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggar aan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Titik Potensi Parkir yang Dikelola	2	200.0 00.00 0			0,00	-	0,00	-	0,00	0	0	-	0	0,00				
	Terlaksana ya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasa n Pelaksanaa n Izin Penyeleng garaandan Terbangunn ya Fasilitas Parkir Kewenanga n Kabupaten/ Kota	2	15	02	2	04	0 0 0 2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggara an dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisa si Pengawas an Pelaksana an Izin Penyeleng garan dan Terbangun nya Fasilitas Parkir Kewenang an Kabupaten /Kota	12	200.0 00.00 0			0	-	0,00	0	-	0,00	0	0	-	0	0,00			
	Terlaksana nya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentas e Kendaraa n Bermotor yang Diuji Secara Berkala	98, 00	315.0 00.00 0,00			90,00	165.000.00 0	22,5 0	18.028.2 90	0,00	82.617.545	2 2 5 0	0	100.645.835,00	2 0 0	100.645.8 35,00	2 0 4	31,95	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	15	02	2	05	0 0 0 1	Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3	165.0 00.00 0			3	165.000.00 0	100 3 0 0	18.028.2 90	100, 00 3 0 0	82.617.545	2 0 0 0 0	6	100.645.835	6	100.645.8 35 0 0 0	2 0 0 0	61,00	

							Kabupaten/Kota																					
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2	15	02	2	07	0030	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3	30.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0	10.250.000	0,00	0	10.250.000	0	10.250.000	0,00	0	34,17			
	Terawasanya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	2	15	02	2	07	0066	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	3	20.000.000	0,00	0,00	700.000	0,00	0	2.920.000	0,00	0	3.620.000	0	3.620.000	0,00	0	18,10			
	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2	15	02	2	08		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	6,00	2.255.100.000,00				2,00	100.000.000	0,00		11.653.401	0,00	30.943.401	0,00	42.596.802	0,00	42.596.802	0,00	1,89	
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten	2	15	02	2	08	0011	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan	12	229.000.000	25,00	1	11.653.401	25,00	1	30.943.401	50,00	2	42.596.802	2	42.596.802	16,67	18,60				

	Terfasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3	100.000.000		0,00	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum						Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tarif Angkutan yang Sesuai Ketentuan	3	200.000.000		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0	0	0	0	0,00

Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu daerah Kabupaten						Sub Kegiatan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Amngkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu daerah Kabupaten	3	100.000.000		0,00	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu daerah Kabupaten						Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas ekonomi Angkutan orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam Satu Daerah Kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu daerah Kabupaten	3	100.000.000		0,00	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											31,25		20,67		42,49		62,50		63,16		20,63	21,03
Predikat Kinerja											SR		SR		SR		SR		R		SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN										10.644.578.339		2.083.978.268		5.139.578.492		7.223.556.760		7.223.556.760				
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Dinas Perhubungan (%)											27,71		19,58		48,28		55,42		67,86		10,32	34,73
Predikat Kinerja Seluruh Program Dinas Perhubungan											SR		SR		SR		S		SR			

Dalam pelaksanaan program/kegiatan tidak semuanya berjalan dengan baik, masih ada permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang diluar perkiraan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program /kegiatan Dinas Perhubungan dilihat dari 2 (dua) faktor tersebut adalah:

A. Faktor Internal

- a) Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan perhubungan.

B. Faktor Eksternal

- a. Adanya perubahan akun dari belanja jasa ke belanja modal;
- b. Adanya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berubah;
- c. Sumberdaya manusia yang masih kurang kompetitif.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dalam pencapaian kinerja maka:

1. Koordinasi perlu dilakukan antar Dinas (Pemda) dan Masyarakat, sehingga ada persepsi yang sama agar pembangunan bidang perhubungan dapat tercapai tepat sasaran.
2. Memaksimalkan Aparatur Dinas yang ada, dengan cara melaksanakan tupoksi sesuai latar belakang penempatannya.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2024

Usulan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka dari 2 program, 12 kegiatan dan 23 sub kegiatan, terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami rekonsiliasi anggaran dikarenakan kondisi keuangan daerah. Dan telah dituangkan dalam tabel Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024. Dari tiap-tiap program/ kegiatan/ Sub kegiatan dan indikator program/ kegiatan/ Sub kegiatan beserta outputnya dengan kebutuhan anggaran yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Sehingga gambaran program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

TABEL 3.1. REKAPITULASI PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUTPUT SUB KEGIATAN DAN TOTAL PAGU INDIKATIF

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	PROGRAM	2	2	0
2	KEGIATAN	12	12	0
3	SUB KEGIATAN	23	22	1
5	PAGU ANGGARAN	10.416.174.555,00	10.575.978.539,00	159.803.984

**RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024
KABUPATEN BANGKA**

DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		DINAS PERHUBUNGAN					10.416.174.555,00	10.575.978.539,00	159.803.984		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					10.416.174.555,00	10.575.978.539,00	159.803.984		
	2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					10.416.174.555,00	10.575.978.539,00	159.803.984		
1	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	26,00	26,00	5.065.955.025,00	5.225.759.009,00	159.803.984			
			16,00	16,00							
			0,00	0,00							
			68,00	68,00							
			3,00	3,00							
			100,00	100,00							

2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 %	100 %	128.000.000,00	128.000.000,00	-			
		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100 %	100 %						
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	78.000.000,00	78.000.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	3.679.532.039,00	3.907.935.823,00	228.403.784,00			
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.624.532.039,00	3.852.935.823,00	228.403.784,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%	100%	19.750.000,00	10.000.000,00	- 9.750.000,00		
Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap			100%	100%						
Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			0%	0%						
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	1 Paket	9.750.000,00	0,00	- 9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100 %	100 %	130.190.000,00	130.190.000,00	-			
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	120.190.000,00	120.190.000,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	65 %	65 %	8.053.500,00	8.053.500,00	-			
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	10 Unit	10 Unit	8.053.500,00	8.053.500,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	100 %	932.189.686,00	912.089.686,00	20.100.000,00			
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	12 Laporan	760.809.338,00	740.709.338,00	20.100.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	90.362.865,00	90.362.865,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	81.017.483,00	81.017.483,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	75 %	75 %	168.239.800,00	129.490.000,00	- 38.749.800,00		
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	15 Unit	15 Unit	157.639.800,00	118.890.000,00	- 38.749.800,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	25 Unit	25 Unit	10.600.000,00	10.600.000,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Wilayah yang terlayani angkutan umum	62,00	62,00	5.350.219.530,00	5.350.219.530,00	-		
			Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan	75,00	75,00					
	2.15.02.2.02	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Jalan</i>	<i>2000 unit</i>	<i>2000 unit</i>	<i>4.935.219.530,00</i>	<i>4.935.219.530,00</i>	<i>-</i>		

2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>	2000 Unit	16 Unit	160.000.000,00	160.000.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan									
			<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	700 Unit	700 Unit	4.725.219.530,00	4.725.219.530,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	2000 Unit	2000 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Diuji Secara Berkala	98 %	98 %	165.000.000,00	165.000.000,00	-			
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>	3 Unit	3 Unit	165.000.000,00	165.000.000,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Jelitik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	-			
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									

			<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.15.02.2.07	<i>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah Dokumen Andalalin yang Tersusun</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	-		
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin									
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin</i>	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin									
			<i>Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi</i>	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.15.02.2.08	<i>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	-		
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
JUMLAH						10.416.174.555,00	10.575.978.539,00	159.803.984,00		

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2024. Tujuan penyusunan Perubahan Renja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2024 serta mengacu pada perencanaan tahun kedua Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian indikator sampai dengan Juni Tahun 2024.

Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024 sangat terbatas, hanya pada Triwulan IV Tahun 2024, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan maupun perubahan. Sehingga semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam Renstra.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renstra namun tidak tercantum dalam renja dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, indikator kinerja telah tercapai pada tahun sebelumnya, adanya penyesuaian nama program dan kegiatan demi keselarasan indikator kinerja maupun perubahan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renja namun tidak terdapat dalam Renstra dimungkinkan dengan kriteria dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD, adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan serta capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan belum terpenuhi.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Juni Tahun 2024. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Sangat disadari bahwa Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Perubahan Renja sangat diharapkan sehingga Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka untuk tahun-tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik.

Demikian Perubahan Rencana Dinas Perhubungan ini disusun, terima kasih.

Sungailiat, 23 Agustus 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bangka,



SAPARUDIN, SE
PEMBINA / IV A
NIP. 19680210 200604 1 004